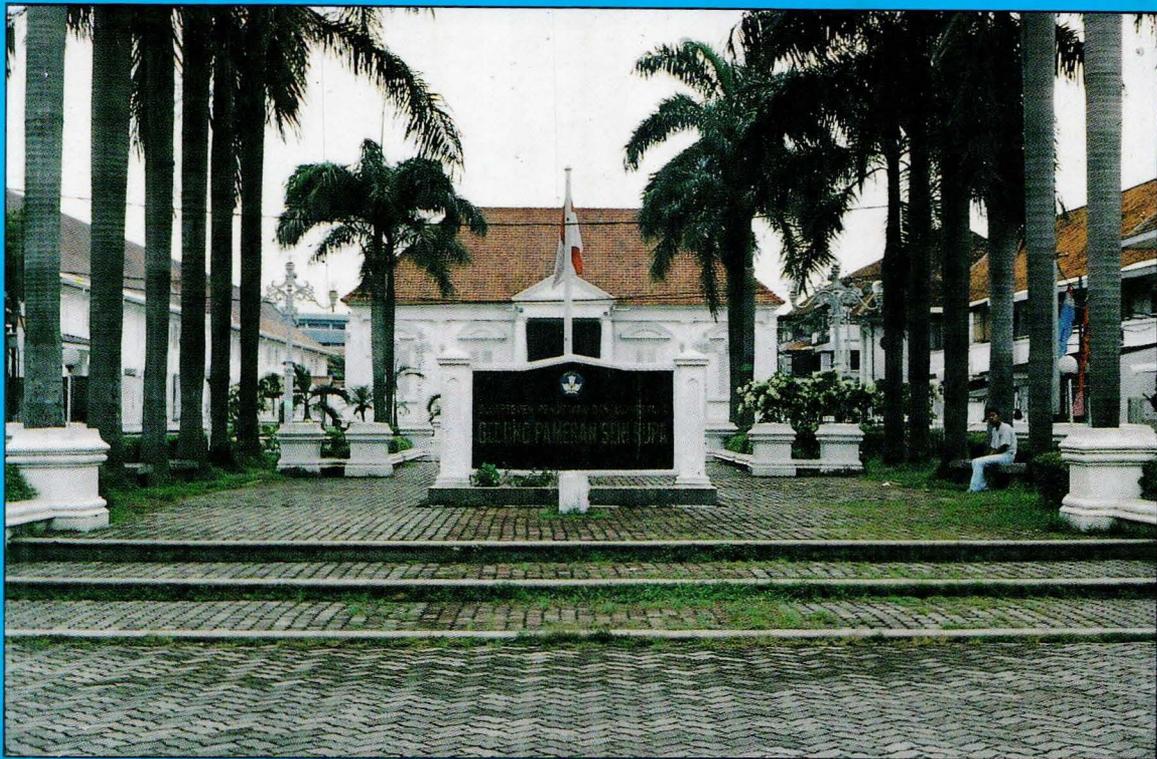




*Sebelas Tahun Berdirinya
Gedung Pameran Seni Rupa Depdikbud*

Menuju Pusat Pengembangan Kebudayaan Nasional



Direktorat
Kebudayaan

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
BAGIAN PROYEK WISMA SENI NASIONAL JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 1997/1998**



700
SEB

*Sebelas Tahun Berdirinya
Gedung Pameran Seni Rupa Depdikbud*

Menuju Pusat Pengembangan Kebudayaan Nasional



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
BAGIAN PROYEK WISMA SENI NASIONAL JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 1997/1998**

**GEDUNG PAMERAN SENI RUPA
MENUJU PUSAT PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN NASIONAL
(sebuah catatan laporan)**

**DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Kata Pengantar

Tanggal 23 Februari 1998 usia Gedung Pameran Seni Rupa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang terletak di kawasan Gambir Jakarta, menginjak usia sebelas tahun. Tepat pada HUT tersebut Direktorat Jenderal Kebudayaan akan menyelenggarakan sebuah pameran seni rupa, dan kali ini memamerkan koleksi-koleksi yang berhasil dihimpun oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan sebagai aset Pemerintah.

Di samping itu juga diterbitkan sebuah buku yang menjelaskan secara kronologi lahirnya konsep pemikiran tentang Gedung Pameran dalam kaitan dengan gagasan pendirian Wisma Seni Nasional dan Pusat Pengembangan Kebudayaan Nasional Setelah berfungsi selama itu patut dipertanyakan seberapa jauh perannya di tengah-tengah maraknya gedung pameran dan galeri yang bermunculan di Jakarta dan apa sumbangannya bagi dunia seni rupa Indonesia, serta langkah apa yang akan diperbuat untuk waktu yang akan datang.

Buku ini merupakan catatan laporan, berjudul "GEDUNG PAMERAN SENI RUPA MENUJU PUSAT PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN NASIONAL"

Secara garis besar dalam buku ini dijelaskan dua topik pokok. Pertama, berisi catatan laporan "SEBELAS TAHUN GEDUNG PAMERAN SENI RUPA" sebagai embrio pembentukan Galeri Nasional. Kedua, menjelaskan sekilas tentang pendirian Galeri Nasional dalam kaitan dengan lahirnya "GAGASAN MENDIRIKAN PUSAT PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN". Galeri Nasional itu sendiri mempunyai kaitan yang erat dengan gagasan mendirikan WISMA SENI NASIONAL yang telah dilontarkan jauh sebelumnya.

Tulisan ini masih banyak kekurangannya karena terbatasnya waktu persiapan, data pendukung dan pengalaman menulis. Mohon kekurangan itu dapat dimaklumi.

Harapan kami cacatan laporan ini dapat menggugah perhatian kita semua untuk memberikan saran, pertimbangan dan bantuan apa saja sehingga gagasan mendirikan Pusat Pengembangan Kebudayaan Nasional dapat benar-benar terwujud. Terima kasih atas bantuan semua pihak sehingga naskah laporan ini dapat diselesaikan.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

	halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
 SEBELAS TAHUN GEDUNG PAMERAN SENI RUPA	
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II SEKILAS SEJARAH GEDUNG PAMERAN SENI RUPA	2
BAB III PENGELOLAAN GEDUNG PAMERAN SENI RUPA	5
BAB IV GEDUNG PAMERAN MENUJU GALERI NASIONAL	11
 GAGASAN PENDIRIAN PUSAT PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN NASIONAL	
BAB I PENDAHULUAN	16
BAB II KONSEP WISMA SENI NASIONAL	19
BAB III HAMBATAN PELAKSANAAN	23
BAB IV KEBIJAKSANAAN BARU TENTANG WISMA SENI NASIONAL	27
BAB V GAGASAN PENDIRIAN PUSAT PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN NASIONAL	29
BAB VI PENUTUP	32
 LAMPIRAN-LAMPIRAN:	

SEBELAS TAHUN GEDUNG PAMERAN SENI RUPA

(Embrio Galeri Nasional)

I. PENDAHULUAN

Tanpa kita sadari, Gedung Pameran Seni Rupa (GPSR) Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang terletak di Jalan Medan Merdeka Timur No. 14, Jakarta Pusat, telah menginjak usia sebelas tahun. Gedung ini tidak hanya menjadi kebanggaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tetapi juga kota Jakarta karena kehadirannya telah ikut meramaikan kota Jakarta sebagai kota Metropolitan dan Ibukota Negara.

Sebagai kota Metropolitan, Jakarta tidak hanya menjadi pusat pemerintahan, perdagangan dan industri tetapi juga menjadi pusat kegiatan budaya. Tanpa adanya kegiatan seni dan budaya, Jakarta menjadi kota sepi dan mati. Oleh karena itu dari waktu ke waktu Jakarta giat menyelenggarakan berbagai kegiatan budaya dan seni, diantaranya Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta mendirikan Taman Ismail Marzuki, untuk mewadahi kegiatan-kegiatan itu.

Sebagai Ibukota Negara, Jakarta menjadi "pintu gerbang", tamu mancanegara memasuki Indonesia. Di samping itu Jakarta juga menjadi "jendela" untuk melihat dan mengenali Indonesia dari segi budayanya. Memasuki kota Jakarta mereka akan mengetahui keanekaragaman seni dan budaya Indonesia, karena bermacam-macam kegiatan kesenian tradisional dan modern dari berbagai daerah digelar di Jakarta. Jakarta memiliki berbagai macam museum, ruang pameran dan galeri seni, tempat memamerkan koleksi dari berbagai daerah. Dalam hubungan ini, GPSR menjadi salah satu unit yang telah ikut berperan menjadi "Jendela" masyarakat mancanegara mengintip dan mengenali perkembangan seni rupa Indonesia.

Gedung ini berada di kawasan elite di dekat berdirinya Monumen Nasional, kebanggaan rakyat Indonesia. Setelah diserahkan kepada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan oleh Brigif I Jaya Sakti tahun 1982 gedung ini dibiarkan dalam keadaan terlantar dan kusam karena akan dibongkar. Di atasnya direncanakan akan dibangun sebuah kompleks bangunan yang disebut WISMA SENI NASIONAL (WSN).

Pemanfaatan gedung ini menjadi GPSR, lahir atas prakarsa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Prof. Dr. Fuad Hassan. Setelah beliau mengetahui realisasi pembangunan WSN tidak lancar dan gedung tidak difungsikan, kemudian diputuskan gedung itu direnovasi dan dijadikan gedung pameran sampai pembangunan WSN dimulai.

Lokasi yang sangat strategis, luas bangunan yang memadai dan bentuk arsitektur yang khas peninggalan zaman kolonial, mendorong beliau untuk memanfaatkannya menjadi gedung pameran seni rupa. Di samping itu, gedung

ini pernah dikuasai oleh sebuah yayasan yang mengambil nama seorang pelukis terkenal dan perintis seni lukis modern Indonesia, yaitu Raden Saleh Boestaman.

Pemugarannya dimulai tahun 1985 dan selesai tahun 1987, dengan melibatkan beberapa seniman untuk memberikan saran, antara lain pelukis Kusnadi dan Abas Alibasyah. Bentuk bangunan masih tetap dipertahankan sebagaimana aslinya, hanya pada beberapa bagian interior diadakan perubahan disesuaikan dengan fungsinya yang baru.

Gedung ini diresmikan menjadi GEDUNG PAMERAN SENI RUPA DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN pada tanggal 23 Februari 1987 oleh Prof. Dr. Fuad Hassan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Semula gedung ini akan diberi nama Gedung Pameran Temporer, karena hanya dipakai untuk menampung kegiatan pameran sewaktu-waktu saja.

Sejak itu di Gambir ada GPSR dan sejak itu pulalah di sana ada kegiatan seni. Di gedung ini telah berlangsung pameran-pameran penting berskala nasional dan internasional membuat kehidupan Jakarta sebagai kota Metropolitan dan sebagai Ibukota Negara menjadi semakin semarak. Banyak seniman dari Jakarta dari daerah, serta dari negara sahabat telah menyelenggarakan pameran di tempat ini. Seniman-seniman dari Australia, Philipina, Thailand, Malaysia, Itali, Jepang, Belanda, Jerman, Prancis telah memamerkan karya di gedung ini. Salah satu pameran yang paling bersejarah adalah ketika diselenggarakan Pameran Seni Rupa Kontemporer Negara-Negara Non-Blok, yang dibuka oleh Presiden Soeharto pada tanggal 28 April-30 Juli 1995. Sebanyak 350 karya seni rupa dari 41 negara dipamerkan di gedung ini.

Meskipun sudah ada GPSR, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tetap memperjuangkan cita-cita memiliki Galeri Nasional, bahkan sebuah Wisma Seni Nasional. Keberadaan GPSR justru menjadi embrio dan modal dasar ke arah terwujudnya kedua impian itu.

II. SEKILAS SEJARAH GPSR

Siapa pun yang melintas di Jl. Medan Merdeka Timur Jakarta akan tertarik pada bangunan yang berhalaman luas dilindungi pohon-pohon palem, gedung berwarna putih tersebut berdiri di antara gedung-gedung menjulang di sepanjang jalan itu. Dari dalam kereta api yang melintas di jalur atas terlihat jelas keanggunan gedung pameran itu.

Dari langgam arsitektur bangunannya mudah dikenali sebagai bangunan peninggalan zaman kolonial Belanda. Semula gedung ini merupakan bagian gedung pendidikan yang didirikan oleh suatu yayasan pendidikan Kristen yang kemudian dikenal dengan singkatan CAS atau Carpentier Alting Stichting. CAS bernaung di bawah “Vrijmetselaren-Loge” (Loge Agung Indonesia) yaitu organisasi Induk Domine A.S. Carpentier Alting.

Yayasan itu pada tahun 1902 mendirikan sekolah menengah pertama khusus untuk wanita atas prakarsa pendeta Albertus Samuel Carpentier Alting dan tempatnya adalah di Koningsplien Cost No. 14, yaitu di Jalan Medan Merdeka Timur sekarang. Kegiatan pendidikan yang diselenggarakan oleh yayasan itu merupakan usaha pendidikan yang pertama di Indonesia yang mengacu pada sistem pendidikan untuk wanita dan pria. Gedung induk yang terletak di tengah-tengah kompleks pendidikan dan dikenal sebagai gedung CAS pernah dipakai sebagai asrama HBS wanita. Sesudah kemerdekaan berubah fungsi menjadi gedung pertemuan dan berbagai kegiatan pendidikan.

“Ketika tahun 1955 segala kegiatan pemerintah dan masyarakat Belanda di Indonesia dilarang, organisasi yayasan dan segala kekayaannya diambil alih oleh Yayasan Raden Saleh, yang dipimpin oleh Soekamto. Di bawah yayasan yang selanjutnya lebih dikenal dengan singkatan YRS itu, usaha pendidikan tersebut terus berkembang antara lain mendirikan sekolah-sekolah swasta seperti SMA, SMP dan SD Mardisunu. Gedung sekolahnya terpecah di tiga tempat yaitu di Jl. Medan Merdeka Timur, Jl. Tegal dan Jl. Blora Jakarta.

Ketika tahun 1962 gerakan “Vrijmetselaren-Loge” dilarang oleh Pemerintah, YRS sebagai penerus CAS dan CAS induknya adalah “Vrijmetselaren-Loge”, maka YRS ikut dilarang dan dibubarkan. Larangan terhadap YRS dikeluarkan oleh Penguasa Perang Tertinggi No. 5 tahun 1962, tanggal 12 Juni 1962 dan ditandatangani oleh Presiden Soekarno. Larangan itu dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 25 tahun 1962.

Dalam Pasal 1 dinyatakan bahwa Yayasan Raden Saleh yang berkedudukan di Jakarta dilarang, dan dalam Pasal 2 disebutkan “Sekolah-sekolah, perguruan-perguruan yang diusahakan oleh Yayasan ini beserta segala peralatannya diambil alih oleh Negara dan diserahkan kepada Departemen Pendidikan Dasar dan Kebudayaan”. Sejak itulah kompleks bangunan yang ada di Jl. Medan Merdeka Timur No. 14 Jakarta menjadi milik Departemen Pendidikan Dasar dan Kebudayaan.

Bagaimana nasib gedung induk dan sekolah-sekolah yang bernaung dalam YRS selanjutnya ? Sekolah-sekolah tersebut tidak dibubarkan begitu saja dan murid- muridnya dibiarkan mencari jalan keluar sendiri-sendiri. Status SMA

digabungkan dengan SMAL Negeri I yang terletak di Jl. Budi Utomo. Beberapa tahun kemudian ditetapkan untuk berdiri sendiri menjadi SMA Negeri VII (hingga sekarang) dan tetap menempati gedung sekolah bekas milik YRS, sedangkan gedung Induk dijadikan gedung pertemuan.

Pada tahun 1965 terjadi peristiwa pemberontakan terhadap pemerintahan yang sah oleh Partai Komunis Indonesia (PKI), dengan Gerakan Tiga puluh Septemhernya (G30S/PKI). Para Pelajar, Pemuda dan Mahasiswa melakukan aksi demonstrasi membantu penumpasan gerakan dengan menuntut agar PKI dibubarkan. Pada saat itulah gedung Induk tersebut dimanfaatkan sebagai markas komando oleh Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) dan Kesatuan Aksi Pemuda dan Pelajar Indonesia (KAPPI). Ketika ketertiban dan keamanan telah berangsur-angsur pulih kembali, KAMI dan KAPPI kembali ke kampus dan sekolah masing-masing. Gedung tersebut kemudian dipakai oleh Kesatuan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI/AD) sebagai Markas Komando Brigade Infanteri I Jaya Sakti di lingkungan Kodam V Jakarta Raya.

Berdasarkan telegram KASAD No. 51/1478/1981, tanggal 11 November 1981 dan dikukuhkan dengan Surat Keputusan Panglima Daerah Militer V/Jaya No. SKIP/19-4/1/1982, aula atau gedung induk itu dikembalikan kepada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan No. 12615/F/1982, tanggal 28 Februari 1982, gedung itu diserahkan pengelolaannya kepada Direktorat Jenderal Kebudayaan. Sedangkan Brigif I pindah menempati markas yang baru di Kampung Pekayon, Jakarta Timur

Tanah dan gedung inilah yang dijadikan modal dalam mewujudkan gagasan berdirinya Wisma Seni Nasional di Jakarta. Atas prakarsa Prof. Dr. Fuad Hassan gedung ini kemudian direnovasi dijadikan GPSR, sambil menunggu realisasi pembangunan WSN yang belum menampakkan titik terang. Gedung ini diresmikan tanggal 23 Februari 1987 sebelas tahun yang lalu. Bersamaan dengan upacara peresmian diselenggarakan pameran lukisan karya Affandi. Pilihan pada Affandi untuk pameran perdana karena namanya bukan saja tidak asing bagi kita, dan tidak terpisahkan dari sejarah seni lukis kontemporer Indonesia, tetapi juga merupakan Penghargaan atas dedikasi Affandi sebagai pelukis "Maestro" hingga dapat merayakan ulang tahunnya yang ke-80. Pameran ini merupakan pameran retrospektif mulai dari karya-karya Affandi sejak awal mulai melukis hingga yang terbaru.

Pada tahun 1992 gedung SMA Negeri VII dipindahkan ke Tanah Abang dan bekas gedungnya diserahkan kepada Direktorat Jenderal Kebudayaan sesuai dengan surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

No. 122/I01. B2/U/92, tanggal 28 Oktober 1992. Dengan diserahkannya tanah dan gedung itu, fasilitas GPSR bertambah luas. Mulai tahun anggaran 1993/1994 dilaksanakan pemugaran dan penataan, hingga selesai tahun 1994.

Dengan selesainya pemugaran dan penataan, sosok GPSR semakin memikat. Panitia Pameran Seni Rupa Kontemporer Negara-negara Non-Blok yang semula memilih Balai Sidang Jakarta sebagai tempat penyelenggaraan pameran akhirnya memilih GPSR sebagai tempat penyelenggaraan pameran. Dalam waktu yang relatif singkat GPSR harus melengkapi beberapa komponen pameran yang belum tersedia, seperti panel, tata suara dan tata lampu. Pameran berlangsung sukses dan GPSR telah “menjalankan tugasnya” dengan baik. Sebanyak 350 karya seni rupa dari 41 negara anggota Non-Blok dapat ditampung di GPSR dan inilah pameran yang paling besar dan bersejarah. Nama GPSR semakin dikenal dan permohonan untuk menggunakan gedung tersebut semakin banyak.

Penampilan GPSR akan semakin bertambah sempurna karena pada tahun 1997 tanah dan bangunan bertambah. Tanah dan bangunan SMP Negeri 35 dan kantor Direktorat Pembinaan Generasi Muda dan Olah Raga, Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olah Raga diserahkan kepada Direktorat Jenderal Kebudayaan. Di samping itu juga tengah diproses pembebasan Flat yang dihuni oleh 41 keluarga, gedung milik INKOPAD dan gedung milik Pertamina.

Sementara itu Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam tahun 1997 memberikan Piagam Penghargaan dan Plaket kepada GPSR karena dianggap telah berhasil memugar dan memelihara bangunan yang tergolong sebagai Benda Cagar Budaya.

III. PENGELOLAAN GEDUNG PAMERAN SENI RUPA

Pemakaian GPSR tidak hanya oleh Pemerintah dalam hal ini Departemen Pendidikan dan Kebudayaan saja, tetapi untuk umum baik pemerintah, swasta dan perorangan serta negara-negara asing. Jenis kegiatan yang bisa dilaksanakan di gedung ini dibatasi hanya yang berkaitan dengan kegiatan seni rupa saja. Persyaratan untuk peminjaman telah diatur dalam pedoman tersendiri.

GPSR sudah dikenal luas oleh kalangan seniman seni rupa Indonesia, bahkan seniman luar negeri. Masyarakat pencinta seni rupa biasa menyebutnya Gedung Gambir. Dalam rangka persiapan menjadi “GALERI NASIONAL (GN),” mulai tahun 1997 nama itu telah mulai dipopulerkan.

Saat ini GPSR tergolong gedung pameran seni rupa terbaik yang ada di Indonesia. Sejumlah kurator asing yang pernah melihat dan terlibat dalam penyelenggaraan pameran menilai GPSR sebagai salah satu fasilitas terbaik di Asia Tenggara. Beberapa kali gedung ini dipinjam untuk setting pembuatan foto, film sinetron, film iklan dan video klip.

Status GPSR hingga saat ini masih merupakan salah satu kegiatan Proyek Wisma Seni Nasional saja. Belum merupakan suatu institusi yang resmi sebagaimana halnya lembaga-lembaga yang lain. Landasan formal yang dipergunakan adalah Keputusan Direktur Jenderal Kebudayaan sebagai penanggungjawab Proyek Wisma Seni Nasional.

Masalah status merupakan hambatan yang paling pokok bagi GPSR, karena dengan status hanya merupakan bagian kegiatan proyek fungsinya tidak dapat berjalan secara optimal. Di samping itu juga masalah sumber daya manusia yang tersedia, belum memenuhi syarat baik secara kuantitas maupun kualitas. Tenaga yang dipergunakan masih bersifat sementara dan tenaga bantuan saja.

Dalam rangka mengoperasionalkan GPSR, Direktur Jenderal Kebudayaan setiap tahun mengeluarkan Surat Keputusan pengangkatan Tim Pengelola GPSR dan Tim Kurator GPSR. Untuk tahun 1997, dikeluarkan Surat Keputusan Nomor : 007/FI.IV/ J.97 tanggal 15 April 1997 membentuk Tim Kurator dengan susunan anggota terdiri atas : Pengarah, Prof. Dr. Edi Sedyawati, Direktur Jenderal Kebudayaan; Ketua, Sudarso SP. MA; Sekretaris, Drs. Djoko Soebandono; dan Anggota: Prof. Drs. Iman Buchari; Jim Supangkat, Drs. Soedarmadji; Fajar Sidik dan Ir. Adi Mursid.

Tim Kurator Seni Rupa Nasional mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Mengamati dan meneliti perkembangan seni rupa Indonesia termasuk seni rupa dunia;
2. Memberikan pertimbangan dan menentukan arah, jenis dan kualitas pameran;
3. Menentukan kebijakan dan kriteria pengadaan koleksi, sistem pendokumentasian dan perawatan koleksi;
4. Menentukan arah pengkajian, pendidikan pemahaman dan penyebaran apresiasi seni rupa.

Di samping itu untuk kegiatan sehari-hari Direktur Jenderal Kebudayaan membentuk Tim Pengelola Harian GPSR, dengan Keputusan Nomor : 003/FI.IV/J.97 tanggal 8 April 1997. Susunan kenggotaan Tim Pengelola Harian Galeri Nasional Indonesia terdiri atas Ketua, Drs. Nunus Supardi;

Wakil Ketua, SB. Manullang; Sekretaris, Dra. Watie Moerany; Anggota : Prof. Drs. AD Pirous, Astari Al Rasyid, Drs, Djoko Soebandono, Irsam dan Suhartono. Ketua Tim Pengelola Harian bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Kebudayaan.

Tim Pengelola Harian Galeri Nasional Indonesia bertugas melaksanakan pengelolaan program dan kegiatan serta administrasi GPSR berupa :

1. Pameran-pameran yang telah disetujui kurator;
2. Inventarisasi dan dokumentasi karya seni rupa;
3. Perawatan koleksi seni rupa berupa konservasi dan restorasi;
4. Kegiatan-kegiatan pengkajian, pendidikan dan pengembangan apresiasi.
5. Perawatan gedung dan lingkungan;
6. Koordinasi pengamanan.

Meskipun belum berbentuk lembaga resmi GPSR telah dapat beroperasi dengan semestinya dan program pameran secara bergilir terus berlangsung. Biaya operasional GPSR selama ini didukung oleh dana Bagian Proyek Wisma Seni Nasional. Kegiatan-kegiatan yang secara rutin dilaksanakan adalah sebagai berikut.

1. Menghimpun Koleksi

GPSR Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, memiliki koleksi karya seni rupa dari banyak pelukis dari pematung Indonesia. Di samping itu juga menghimpun koleksi dari beberapa seniman asing yang disumbangkan kepada Pemerintah termasuk yang disumbangkan oleh beberapa negara anggota Gerakan Non-Blok.

Pengumpulan koleksi telah dimulai bertahun-tahun yang lalu, sejak dibentuk Kantor Dinas Bagian Kesenian pada saat pemerintahan RI berada di Yogyakarta. Koleksi tersebut ikut pindah ke Jakarta ketika kantornya dipindahkan ke Jakarta menjadi Jawatan Kebudayaan. Koleksi-koleksi itu menjadi koleksi masterpiece dan menjadi koleksi negara yang penting dan bersejarah.

Koleksi tersebut antara lain karya : Raden Saleh; S. Soedjojono; Affandi; Basuki Abdullah dan Achmad Sadali. Di samping itu juga koleksi karya-karya seniman kelas dunia, perintis seni rupa modern dunia di antaranya Vassiliy Kadinsky, Hans Hartung, Zou Wu Ki, Victor Vasarely, Delaunay, dan Juan Miro. Karya-karya sumbangan dari seniman dunia sebagai ungkapan simpati atas

kemerdekaan Republik Indonesia pada awal tahun 1950-an yang diberikan oleh Pemerintah Prancis, merupakan koleksi negara yang sangat tinggi nilainya.

Koleksi-koleksi tersebut sementara ini disimpan di tiga tempat yaitu :

- a. Di GPSR koleksi yang dihimpun oleh Proyek Wisma Seni Nasional dan Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan;
- b. Di Direktorat Kesenian, Jalan Kimia 12 untuk koleksi yang dihimpun oleh Direktorat Kesenian;
- c. Di Museum Nasional, Jalan Merdeka Barat 14 untuk koleksi Museum Nasional.

Perincian koleksi tersebut adalah :

1) Koleksi GPSR

- Lukisan dan grafis : 378 (36 lukisan dan grafis, sumbangan negara-negara Non-Blok)
- Koleksi Patung, 11 buah
- Karya Kria, dan Keramik sebanyak 59 buah.
- Karya Fotography 1 buah

2) Koleksi Direktorat Kesenian

- Lukisan, sketsa dan grafis, sebanyak 359 buah.
- Patung, 40 buah dalam ukuran besar dan kecil.
- Karya Kria dan Keramik sebanyak 261 buah.

3) Koleksi Museum Nasional

Berupa Lukisan/Gambar/sketsa berjumlah 450 buah (diantaranya 70 lukisan, 100 lithografi sumbangan pelukis R. Basuki Abdullah dan seniman mancanegara). Seni Patung 17.

Untuk memudahkan pengamanan dan perawatan, koleksi yang berada di tiga tempat tersebut dikumpulkan menjadi satu di tempatkan di GPSR. Apabila Galeri Nasional telah terwujud maka seluruh koleksi tersebut secara otomatis menjadi koleksi Galeri Nasional.

2. Melaksanakan Perawatan Koleksi

Dalam rangka memelihara dan merawat koleksi milik negara telah dilakukan fungsi perawatan koleksi sebagai berikut :

a. Penyimpanan

Koleksi yang berada di GPSR disimpan di gudang khusus dengan fasilitas gudang disesuaikan semaksimal mungkin mengikuti persyaratan penyimpanan karya seni rupa, antara lain : AC, Panel Geser dan Panel Kayu, dan untuk pengamanan dibantu dengan Alarm system. Koleksi-koleksi yang berada di Museum Nasional dan Direktorat Kesenian dikumpulkan menjadi satu di storage GPSR.

b. Pendokumentasian

Di samping dicatat dan difoto, koleksi-koleksi tersebut juga didokumentasikan dalam bentuk katalog.

c. Konservasi dan Restorasi

Perawatan/konservasi yang dilaksanakan bersifat cepat/ringan yaitu pembersihan karya seni dan debu atau kotoran dengan peralatan sederhana, sedangkan perbaikan yang dilaksanakan berupa perbaikan ringan yaitu perbaikan karya seni berupa penggantian pigura dan spanraam lukisan. Mengingat kondisi koleksi yang sudah tergolong tua diperlukan konservasi yang profesional oleh tenaga ahli konservator.

3. Pameran

Kegiatan pameran seni rupa yang diselenggarakan di GPSR Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dikoordinasikan oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan, dibantu Tim Kurator yang diangkat oleh Direktur Jenderal Kebudayaan. Penyelenggaraan pameran disini sebagian merupakan program Direktorat Jenderal Kebudayaan dan disamping itu terdapat penyelenggaraan pameran-pameran oleh seniman (pribadi). Selama sebelas tahun telah diselenggarakan sebanyak 151 (Saratus lima puluh satu) pameran tunggal maupun kelompok/bersama.

Ada 3 pola pameran di GPSR yang ditetapkan yaitu :

a. Pameran Tunggal/Bersama

Pameran tunggal berarti materi yang dipamerkan berasal dari karya seorang pelukis saja. Sedangkan pameran bersama berarti gabungan koleksi dari lebih dari seorang pelukis. Biaya penyelenggaraan pameran pola ini ditanggung sepenuhnya oleh pihak penyelenggara (seniman). Peminjaman gedung dilakukan dengan cara Pemohon mengajukan proposal kepada Direktorat Jenderal Kebudayaan dan selanjutnya akan diberikan pertimbangan oleh Dewan Kurator. Posisi Direktorat Jenderal Kebudayaan hanya membantu menyediakan fasilitas pameran berupa

panel, lampu, bantuan teknis tata pameran dan keamanan. Dalam satu tahun dapat dilaksanakan sekitar 15 kali pameran tunggal maupun kelompok. Setiap penyelenggaraan pameran berlangsung antara 1 minggu sampai 3 minggu. Selama sebelas tahun telah diselenggarakan pameran sebanyak \pm 150 kali.

b. **Pameran Kerja Sama**

Pameran ini dilaksanakan berdasarkan kerja sama antara Direktorat Jenderal Kebudayaan dengan pihak lain seperti lembaga/organisasi kebudayaan/kesenian, museum, Galeri, dan Pusat Kebudayaan negara sahabat. Biaya penyelenggaraan ditanggung bersama dengan pihak Direktorat Jenderal Kebudayaan. Dalam satu tahun dilaksanakan kurang lebih sepuluh kali pameran kerja sama dan setiap pameran berlangsung antara 2 minggu sampai 1 bulan.

c. **Pameran Khusus**

Pameran khusus adalah pameran yang penyelenggaraannya dibiayai sepenuhnya oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan. Tema pameran dipilih berdasarkan pertimbangan Dewan Kurator. Koleksi yang dipamerkan adalah koleksi milik Direktorat Jenderal Kebudayaan atau koleksi milik seniman atau kolektor. Dalam satu tahun diprogramkan 2-3 kali pameran Khusus.

4. Seminar dan Diskusi

Kegiatan seminar dan diskusi biasanya diselenggarakan bersamaan atau mengiringi kegiatan pameran. Untuk keperluan seminar kecil dan diskusi dapat dilaksanakan pada ruang khusus ruang seminar, kapasitas 150 orang.

5. Pemeliharaan Gedung

Bangunan GPSR terdiri atas: Gedung Induk yang sekarang disebut Ruang A, gedung Eks SMA Negeri VII terdiri atas dua lantai disebut ruang B dan C, gudang/storage, toilet, taman dan tempat parkir.

Luas tanah GPSR seluruhnya sampai saat ini sekitar : 28.620 m², dipakai untuk bangunan (1.500 m²), kawasan parkir, dan taman.

Secara rutin, gedung beserta peralatannya dipelihara dan dirawat dengan dana yang berasal dari Proyek Wisma Seni Nasional. Meskipun jumlahnya tidak terlalu besar berkat perawatan dan pemeliharaan yang rutin dilaksanakan, penampilan gedung masih tetap menarik.

Ruang-ruang yang ada di GPSR terdiri atas :

- a. Lobby
- b. Ruang VIP, ruang rapat VIP, sarana dapur, toilet VIP
- c. Satu ruang pameran utama, Ruang A.
- d. Lima ruang pameran kelompok Ruang B (lantai 1)
- e. Dua ruang pameran kelompok Ruang C (lantai 2)
- f. Dua ruang pameran terbuka
- g. Satu ruang seminar
- h. Kantor Dewan Kurator
- i. Kantor administrasi
- j. Kamar penginapan dilengkapi ruang tamu
- k. Ruang persiapan pameran
- l. Gudang
- m. Toilet.

Setelah sebelas tahun menjalankan fungsinya, menambah keyakinan kita bahwa konsep dan gagasan untuk mendirikan Galeri Nasional dan Teater Nasional dan kompleks Wisma Seni Nasional bukanlah adalah merupakan hal yang wajar untuk negara kita. GPSR telah menjalankan misinya dengan baik, namun apa yang dilakukan baru sebagian saja dari program pembinaan dan pengembangan seni rupa. Sebagian yang lain hanya dapat dilakukan oleh sebuah Galeri. Galeri Nasional berfungsi sebagai tempat untuk pameran, penyimpanan dan pemeliharaan karya seni rupa, bimbingan edukatif berupa seminar, diskusi, workshop, serta sebagai tempat penampung dan penyalur aspirasi seniman khususnya seniman perupa.

IV. GEDUNG PAMERAN SENI RUPA MENUJU GALERI NASIONAL

Dalam wacana kebudayaan, terdapat kelaziman membaca budaya sesuatu bangsa melalui lembaga-lembaga kebudayaan yang dimilikinya, seperti Museum Nasional, Perpustakaan Nasional dan Galeri Nasional. Kita telah memiliki Museum Nasional, tempat menyimpan benda-benda warisan budaya yang secara keseluruhan menggambarkan sejarah kebudayaan bangsa serta keanekaragaman budaya di Indonesia. Sesuai dengan cakupan tugasnya, bidang ilmu yang terkait dalam penyusunan dan pengelolaan Museum Nasional adalah arkeologi, antropologi, dan sejarah.

Kita telah memiliki Perpustakaan Nasional, suatu lembaga non departemen yang mempunyai tugas dan fungsi membina seluruh jenis perpustakaan dan memberikan layanan informasi ke seluruh lapisan masyarakat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan menunjang pelaksanaan pembangunan

nasional. Lembaga ini menghimpun karya-karya pustaka dan terbitan yang meliputi berbagai bidang ilmu.

Galeri adalah lembaga kebudayaan yang berkaitan dengan produk sesuatu bangsa dalam era modern memasuki dekade 80-an peran Galeri di negara-negara berkembang menjadi semakin penting dalam perkembangan seni rupa modern dunia. Perkembangan ini merupakan tanda-tanda perubahan budaya modern dunia yaitu terjadi pergeseran di mana peran institusi seni rupa di negara maju (yang dominan sejak abad ke-19) mulai menurun dan institusi seni rupa negara berkembang mulai menentukan perkembangan seni rupa modern dunia.

Tanda-tanda ke arah itu sudah ada dengan terselenggaranya pameran dan seminar internasional seni rupa kontemporer negara-negara Non-Blok yang diikuti oleh 41 negara berkembang. Pameran tersebut diprakarsai oleh Indonesia, dan diselenggarakan pada bulan, April-juni 1995. Di Bali diselenggarakan pula pameran lukisan internasional. Di samping itu beberapa kali Indonesia menyelenggarakan pameran tingkat regional.

Perubahan yang terjadi dalam skala abad itu merupakan "peluang emas" bagi negara berkembang seperti Indonesia. Oleh karena itu pembentukan Galeri Nasional di Jakarta merupakan bagian dari upaya untuk meraih peluang emas itu, dan menampilkan peran Indonesia dalam perkembangan budaya dunia. Banyak seniman, budayawan, kritikus seni dan pejabat yang telah menyampaikan pendapatnya tentang perlunya segera didirikan Galeri Nasional, antara lain : Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi, Joop Ave, Sri Warso Wahono, Sudarmadji, Kartika Affandi, Wiyogo Atmodarminto, Abas Alibasyah. Astari Rasyid, Amir Sidharta, dan Agus Dermawan T.

Dalam menampilkan budaya modern, galeri melakukan penghimpunan karya-karya seni rupa yang tumbuh dalam dunia modern, yaitu lukisan, patung dan karya grafis yang dikenal sebagai medium ekspresi budaya modern. Sesuai dengan perkembangan kebudayaan modern yang mengutamakan visi, wacana dan kemajuan, maka sifat Galeri Nasional diharapkan bersifat sangat dinamis.

Selain menyimpan karya-karya seni rupa (bersifat museum) galeri juga menjadi sarana bagi pameran-pameran berkala, diskusi kesenian, kegiatan seniman dan tempat masyarakat meningkatkan apresiasi seni rupa dan meningkatkan pemahaman nilai-nilai kebudayaan modern. Dengan demikian Galeri Nasional merupakan pusat kegiatan seni rupa. Galeri Nasional dapat mencerminkan perkembangan dunia modern di Indonesia yang berkaitan dengan perjalanan sejarah bangsa Indonesia.

Galeri Nasional perlu ditunjang oleh fasilitas sarana dan prasarana yang memadai, serta sumber daya manusia yang profesional. Galeri Nasional diharapkan menjadi pusat informasi seni rupa dan dapat menampung perupa-perupa Indonesia untuk menggelar hasil karya dengan fasilitas yang memadai.

Kita belum memiliki Galeri Nasional Indonesia. Semua persyaratan untuk dibentuknya sebuah lembaga Galeri Nasional telah terpenuhi. Kita telah memiliki gedung pameran di Gambir, 1.609 buah koleksi senirupa : lukis, patung, grafis, dan lain-lain. Sebagai aset budaya bangsa, karya seni rupa yang sebagian besar merupakan karya puncak, selayaknya ditampung dan ditampilkan kepada masyarakat luas dalam bentuk pameran tetap dan temporer, diskusi/seminar untuk kepentingan studi. Melalui pameran tetap disajikan (display) perjalanan sejarah seni rupa Indonesia sehingga dapat menambah wawasan sejarah dan peningkatan apresiasi terhadap wacana kesenirupaan Indonesia maupun dunia.

Oleh karena itu, GPSR Gambir perlu ditingkatkan statusnya menjadi Galeri Nasional Indonesia agar kinerjanya bisa lebih meningkat lagi. Usul pembentukannya menjadi lembaga mandiri sedang dalam proses di Kantor Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, dan diharapkan dalam waktu dekat dapat terwujud.

Dengan adanya lembaga itu nasib koleksi yang telah menjadi aset negara maupun yang ada di masyarakat mendapatkan perhatian lebih profesional. Di samping itu galeri ini juga akan menjadi wadah yang representatif bagi penampungan dan penyaluran aspirasi seniman, sebagai tempat pengkajian seni dan karya-karya seni rupa untuk dikembangkan menjadi pemikiran baru.

Pendirian Galeri Nasional juga bertujuan menjadi media bagi terjalinnya hubungan dan komunikasi antara perkembangan seni rupa Indonesia dengan perkembangan seni rupa dunia, yang pada gilirannya akan menampilkan wacana seni rupa Indonesia sebagai elemen diskursif yang ikut mewarnai pembentukan wacana seni rupa dan juga budaya-modern dunia di masa datang.

Tugas dan fungsi Galeri Nasional adalah sebagai tempat untuk pengumpulan, pendokumentasian, registrasi, konservasi, restorasi, reproduksi, penyajian/pameran, penelitian, penyebarluasan informasi dan bimbingan edukatif terhadap karya seni rupa.

Dalam menjalankan perannya Galeri Nasional mempunyai tugas dan fungsi sebagai tempat/wadah :

1. Penyusunan program pameran dan pengkajian seni rupa;

2. Pelaksanaan pengadaan koleksi perpustakaan registrasi, konservasi/restorasi, dokumentasi;
3. Pelaksanaan bimbingan edukatif tentang karya seni rupa;
4. Penyebarluasan hasil karya seni rupa dan perpustakaan;
5. Pelaksanaan kerjasama di bidang seni rupa;
6. Pelaksanaan urusan Tata Usaha.

Kehadiran GN sangat penting bagi pelaksanaan pembinaan dan pengembangan seni rupa Indonesia. Dari sisi nasional maupun internasional keberadaan GN sangat strategis dalam mengangkat posisi negara dan bangsa Indonesia. Dari sisi nasional, kehadiran GN dapat mengangkat posisi kebudayaan bangsa sebagai pengikat persatuan dan kesatuan bangsa, pengukuhan jati diri bangsa. Juga sebagai realisasi dari upaya melengkapi kebutuhan adanya lembaga kebudayaan yang secara khusus dan profesional menangani masalah seni rupa.

Dari sisi internasional, kehadiran Galeri Nasional dapat dipakai sebagai sarana untuk meraih pengakuan dunia bahwa bangsa Indonesia memiliki karya seni rupa puncak dan memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif untuk dipersandingkan dengan karya seni rupa negara-negara lain. Hal ini akan mendorong daya kreativitas seniman untuk menghasilkan karya-karya puncak yang berskala internasional.

**GAGASAN PENDIRIAN PUSAT PENGEMBANGAN
KEBUDAYAAN NASIONAL**

(sebuah catatan sekilas)

1. PENDAHULUAN

Banyak orang yang sudah lupa bahwa kita bangsa Indonesia pernah bercita-cita mulia, ingin memiliki sebuah gedung WISMA SENI NASIONAL (WSN) yang megah dan bertaraf internasional. Gedung itu tidak hanya bermanfaat bagi pembinaan dan pengembangan kesenian tetapi juga bisa dijadikan kebanggaan bangsa. Cita-cita itu telah diperbincangkan secara serius sejak 38 tahun yang lalu. Pada saat itu disetujui sebagai salah satu sasaran Pembangunan Nasional Semesta Berencana. Boleh dikatakan gagasan itu mendapatkan persetujuan seluruh rakyat melalui para wakilnya yang duduk di Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS).

Pada masa Orde Baru sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan nasional di segala bidang, ketika PELITA menginjak tahun anggaran 1974/1975, cita-cita itu kembali mengemuka. Tidak hanya kalangan seniman yang setuju dan sangat mengharapkan kehadiran WSN, tetapi juga seluruh budayawan, pencinta seni dan juga seperti yang terdahulu mendapat persetujuan seluruh rakyat Indonesia melalui para wakilnya yang duduk di MPR/DPR.

Mengapa kita perlu memiliki WSN ?

Gagasan itu lahir karena didorong oleh kenyataan makin lama makin terasa betapa banyak karya-karya seni rupa masterpieces Indonesia terkuras, lari ke luar negeri. Sangat sedikit orang Indonesia yang peduli untuk “mengamankan” karya-karya itu agar tetap “nyaman” di negeri sendiri.

Gejala lain yang dirasakan adalah makin merosotnya jumlah seniman yang mampu melahirkan karya besar, sehingga dikhawatirkan “kontinuitas” perjalanan sejarah seni rupa Indonesia akan terputus dan proses “pemunahan” dan “pemelaran” kekayaan seni makin sulit dicegah. Diperlukan suatu wadah yang bisa menjadi sarana penyelamat, pelindung dan “suaka” bagi karya-karya seni bangsa, di samping untuk menggambarkan kontinuitas proses sejarah seni di Indonesia dan pewarian nilai budaya dan seni bangsa, mengembangkan dan membangkitkan daya juang serta menumbuhkan kreativitas masyarakat setiap zaman. Wadah itu juga dapat dijadikan sarana pendidikan mental spiritual dan intelektual, serta membentuk kesatuan wawasan budaya bangsa.

Wadah yang dicita-citakan itu diberi nama WISMA SENI NASIONAL. Kita bangga disebut sebagai negara yang berbudaya tinggi. Kita mempunyai Borobudur yang diakui sebagai salah satu keajaiban budaya dunia, pelukis Affandi seorang “Maestro” yang telah mendapatkan Pengakuan sebagai pelukis kelas dunia, musik Gamelan dan Wayang yang khas

Indonesia. Kita menjadi bangsa besar karena memiliki corak budaya yang beraneka ragam yang telah dijadikan modal dasar pembangunan nasional.

Sebagai negara dan bangsa yang besar terdiri dari lebih 500 sukubangsa dan memiliki budaya yang beranekaragam, wajar kalau mempunyai keinginan memiliki WSN. Wajar kalau kita “iri” dan ingin memiliki fasilitas kebudayaan sebagaimana yang dimiliki oleh negara-negara lain. Siapa pun yang telah berkesempatan mengunjungi galeri atau teater di luar negeri seperti di Jerman, Belanda, Prancis, Amerika, Jepang, Australia, Amerika Latin dan bahkan yang ada di Thailand, Mesir dan Singapura, pasti di dalam batin akan timbul pertanyaan, kapan Indonesia juga memiliki gedung seperti itu ?

Kita kagum dengan gedung yang besar dan megah, lengkap dengan fasilitas pendukungnya yang canggih. Kita “iri” dengan terbukalebarnya kesempatan, seni terangkat ke posisi yang terhormat karena karya seni itu dipamerkan atau dipergelarkan di tempat yang terhormat dari dikunjungi oleh banyak orang yang tahu bagaimana menghargai seni Bangsa yang membangun fasilitas megah itu seperti tidak lagi mempersoalkan karya itu sebagai karya mercusuar, malahan diyakini sebagai karya monumental yang dapat membangkitkan semangat dan kebanggaan bangsa. Di negara sana seperti tidak dipersoalkan mana yang harus ada terlebih dahulu, fasilitas gedungkah atau prestasi senikah ? Mereka seperti tidak peduli dengan persoalan-persoalan itu, meski untuk membangun gedung kesenian harus mengeluarkan uang jutaan dolar

Di sanaping itu, yang tidak boleh dilupakan adalah amanat yang diberikan oleh UUD 1945. Pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia”. Dalam penjelasan pasal ini dinyatakan bahwa : “Kebudayaan bangsa ialah kebudayaan yang timbul sebagai buah budinya rakyat Indonesia seluruhnya. Kebudayaan lama dan asli terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah di seluruh Indonesia terhitung sebagai kebudayaan bangsa. Usaha kebudayaan harus menuju ke arah kemajuan adab, budaya dan persatuan dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan atau memperkaya kebudayaan bangsa sendiri, serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia”.

Ini berarti kepada kita semua diamanati untuk menjunjung tinggi martabat bangsa dengan berperilaku sesuai dengan budayanya sebagai perwujudan jatidiri bangsanya. Kepada kita juga diamanati agar terus memajukan kebudayaan bangsa, melestarikan dan mengembangkan wawasan budaya

bangsa. Kebudayaan nasional sebagai acuan kehidupan berbangsa harus dibangun seiring dengan proses pembangunan itu sendiri sehingga pembangunan nasional merupakan pembangunan yang berbudaya.

Dalam kaitan dengan pembangunan nasional posisi kebudayaan menjadi unik dan penting. Di satu sisi kebudayaan adalah modal dasar pembangunan tetapi pada sisi lain kebudayaan merupakan salah satu sasaran pembangunan. Kadang-kadang kebudayaan ditempatkan sebagai “pencegah” bahkan “obat penyembuh” dampak negatif dari pembangunan, tetapi juga dapat digolongkan sebagai penghambat pembangunan.

Untuk melaksanakan pembinaan dan pengembangan kebudayaan sesuai amanat Pasal 32 UUD 1945 dan GBHN, diperlukan fasilitas, sarana dan prasarana yang memadai. Harus diakui sampai saat ini kita belum memiliki tempat yang dapat berfungsi menampung aktivitas seni rupa Indonesia yang bertaraf nasional. Kita juga belum memiliki gedung untuk mengakomodasikan secara baik aktivitas pertunjukan dan melaksanakan pembinaan dan pengembangan seni pentas yang memadai.

Apakah yang dimaksud dengan WSN ?

Kata “wisma” itu sendiri mengandung arti rumah atau kompleks rumah. Yang dimaksud dengan Wisma Seni yang dicita-citakan itu adalah wadah (rumah atau kompleks) yang berfungsi untuk melaksanakan aktivitas pembinaan dan pengembangan kebudayaan, khususnya sebagai tempat pertunjukan dan pentas karya-karya puncak seni rupa dan seni pentas baik tradisional maupun komposer.

Dari pengertian ini terkandung keinginan, sarana itu merupakan kompleks yang memiliki komponen bangunan galeri dan teater. Tentang pemberian nama sarana itu sebagai Wisma Seni masih bersifat sementara, karena ada sebagian orang yang tidak setuju dengan nama itu.

Seperti telah diutarakan di atas alasan dibangunnya WSN karena wadah itu diharapkan dapat menjadi sarana untuk menanggulangi proses pemiskinan nilai-nilai warisan budaya dan spiritual bangsa. Kalau proses itu tidak dicegah dikhawatirkan akan mengakibatkan kelesuan daya kreativitas dan inovasi seniman, pendangkalan penghayatan seni, dan hilangnya mata rantai sejarah seni Indonesia.

Di samping itu WSN akan memberikan pelayanan kebutuhan seni masyarakat sebagai imbalan atas pemenuhan kebutuhan materi. WSN berfungsi untuk menampilkan puncak-puncak prestasi seni yang merupakan

kesinambungan sejarah seni yang, dapat memberikan kekayaan rohani dan sekaligus menggugah kesadaran, kebanggaan dan kecintaan yang mendalam terhadap tanah air, bangsa dan kemanusiaan.

II. KONSEP WISMA SENI NASIONAL

Gagasan untuk mendirikan WSN sesungguhnya bukan merupakan hal yang sama sekali baru. Jauh sebelum gagasan ini ditawarkan untuk dijadikan salah satu sasaran pembangunan nasional (PELITA), gagasan ini telah muncul dan diusulkan pada sidang para wakil rakyat tahun 1960 dan di tuangkan dalam suatu ketetapan yaitu dalam TAP No. II/MPRS/1960, tentang Rencana Pembangunan Nasional Semesta Berencana. Rencana pembangunan WSN itu telah dimasukkan sebagai salah satu sasaran pembangunan proyek berkode : AA.3/4. Tetapi karena situasi politik dan kondisi keuangan pada waktu itu tidak memungkinkan untuk mewujudkan gagasan itu, maka proyek tersebut menjadi terhenti.

Memasuki Pelita II, tahun 1974/1975 kegiatan pembangunan WSN masuk sebagai salah satu kegiatan pembangunan di bidang kesenian. Ini berarti dua kali gagasan WSN mendapatkan ujian dan saringan layak atau tidak layak dibangun dari para wakil rakyat. Dua-duanya lulus, disetujui dan bahkan telah diberikan nomor kode.

Pada awalnya (1974) hanya merupakan salah satu dari kegiatan Proyek Pengembangan Media Kebudayaan di bawah Direktorat Jenderal Kebudayaan. Kegiatan pertama yang dilakukan adalah lokakarya membahas tentang pendirian WSN, diselenggarakan pada tanggal 14 Juli 1974, dihadiri oleh sejumlah seniman, budayawan ilmuwan dan arsitek. Kegiatan ini dijadikan saat awal "rintisan" pendirian WSN. Salah satu hasilnya adalah terbentuknya Tim Khusus yang diketuai oleh Ir. Soeparto, Mr, dosen ASRI Yogyakarta. Tugasnya adalah mengumpulkan data dan informasi yang relevan dengan gagasan tersebut, sebagai bahan penyusunan konsep dan WSN dan persiapan penyelenggaraan sayembara, Rencana Gagasan WSN.

Tahun 1975 dimulai sayembara tahap 1, yaitu sayembara membuat Rencana Gagasan atau Pradisain. Pembukaan pendaftaran dimulai tanggal 15 Mei 1975 dan ditutup tanggal 15 Juli 1975. Peserta cukup banyak, ada 17 peserta yang menyerahkan rencana dan setelah disaring ada 3 peserta dinyatakan gugur karena tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan. Dari 14 peserta yang lolos tahap pertama, 10 peserta diizinkan untuk mengikuti sayembara tahap II.

Pada tahun 1976, dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, DR. Sjarif Thayeb, No. 0241/P/1976, tanggal 20 September 1976, dibentuk Panitia Kerja Nasional Perencanaan WSN. Tugasnya adalah menyiapkan konsep gagasan dan memberikan saran dan pertimbangan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Panitia diketuai oleh Prof. Dr. I. B. Mantra, Direktur Jenderal Kebudayaan, dan dibantu oleh 15 orang yaitu : Abas Alibasyah; Sutarso, SH; Ir. Soeparto, MR; Letkol. Sunarjo; Ir. David Ngilly; Dr. Soedjatmoko; Ir. Herbowo; Ir. F. Silaban; Drs. Suwandono; M. Said; Affendi; Drs. Yusuf Enoch, MA; Dr. Soedjoko; Ir. Raswoto dan Drs. Fajar Sidik. Sedangkan sebagai Penasihat adalah : Menteri Dalam Negeri; Menteri Perhubungan, Menteri Penerangan; Wakil Panglima ABRI; dan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Panitia telah mengadakan beberapa kali sidang dan menghasilkan beberapa kesimpulan yang dapat dijadikan sebagai konsep dasar pembangunan WSN. Beberapa hasil yang dicapai antara lain :

1. Lokasi yang akan dipergunakan untuk membangun WSN adalah di atas tanah Jl. Medan Merdeka Timur No. 14 Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat. Pemda DKI sangat mendukung lahan di alamat tersebut dipakai untuk pembangunan WSN. Tidak lama kemudian, keluarlah Izin Prinsip Penggunaan Tanah, sesuai Keputusan Gubernur Kepol Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Ali Sadikin, No. 579 tahun 1977 tentang Penguasaan Perencanaan Bidang Tanah seluas 13 Ha yang terletak di Jl. Medan Merdeka Timur, Kelurahan Gambir, Wilayah Jakarta Pusat, untuk Lokasi Wisma Seni Nasional. Peta situasi dengan nomor pemeriksaan 182/P/P3K/DTK/V/77 aslinya disimpan di Sekretariat Wilayah DKI Jakarta (Biro III) sebagai lokasi WSN. Selanjutnya ditugaskan kepada Direktorat IV/Pembangunan, Dinas Tata Kota, Dinas Pengawasan Pembangunan Kota, Direktorat Agraria dan Walikota Jakarta Pusat untuk mengadakan pengawasan dan pengamanan atas peruntukan bidang tanah dimaksud, selanjutnya melaksanakan isi keputusan tersebut.

Pemilihan lokasi ini disesuaikan dengan planologi kota Jakarta dan diharapkan WSN menjadi "point of interest" di ujung sumbu Silang Monas dengan bangunan berskala nasional. Dengan luas tanah yang diperkirakan akan dapat disediakan, sangat besar kemungkinan untuk dapat membuat ruangan-ruangan luar yang terbentuk dari gubahan massa, selaras dengan kondisi lokasi Jl. Medan Merdeka Timur berada dalam kawasan Monumen Nasional (Monas) dengan menciptakan keharmonisan bentuk dan tata letak bangunan sehingga dapat memperkuat kebedaraan Monas. Lokasi ini dipilih karena di tempat ini berdiri beberapa bangunan sekolah milik Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sehingga pembebasannya relatif lebih mudah.

2. Bangunan dibuat bertingkat banyak, mengarah ke barat ke arah Monas, dan bangunan-bangunan pelengkap dibuat sedemikian rupa sehingga terjadi gubahan massa yang membentuk ruang-ruang luar.
3. Memindahkan Jl. Batu ke sebelah Selatan, sampai pada batas Kedutaan Vatikan dan gedung PLN Gambir karena Jl. Batu akan berada di tengah-tengah lahan.
4. Tanah yang berada paling timur yang terpisah dari kompleks sebagai akibat adanya rencana kota dan berada di seberang sungai dijual dan uangnya dipakai untuk pembangunan WSN.

Disamping itu dihasilkan beberapa kesimpulan dan saran sebagai berikut :

1. Sekalipun proyek WSN dalam perintisannya merupakan salah satu kegiatan dari kegiatan proyek di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, tetapi mengingat bahwa proyek WSN merupakan proyek yang bertaraf Nasional (seperti ditetapkan dalam TAP MPR IV Tahun 1977), maka sebaiknya ditempuh cara-cara :
 - a. Proyek ini perlu disetujui dan disahkan oleh Presiden RI.
 - b. Untuk pengelolaannya perlu dibentuk suatu Badan (sejenis) Project Implementation Unit (PIU) dimana di dalamnya termasuk beberapa unsur perintis (Panitia Kerja Nasional Persiapan Perencanaan WSN).
 - c. Pengelolaan proyek harus bersifat “ berdiri sendiri “ dan tidak dikaitkan kepada Anggaran Biaya Departemen.
2. Mengingat sifatnya yang harus mengandung sendi-sendi ke-Nasional-an serta kepribadian yang khas, maka masih perlu difikirkan aspek-aspek pokok yang dapat memberikan pencerminan yang khas pula.
3. Mengingat Proyek WSN ini tidak mungkin dibangun sekaligus dalam waktu yang singkat, maka dituntut pula sistem pentahapan secara pragmatis baik dipandang dari fasilitas-fasilitas yang tersedia maupun anggaran biayanya.
4. Mengingat baik dimasa persiapan maupun setelah terwujudnya proyek WSN ini membutuhkan tenaga-tenaga yang cukup banyak serta mempunyai keahlian khusus, maka harus segera dipikirkan tentang cara-cara pengadaan dan pendidikan tenaga-tenaga ahli khusus
5. Ditinjau dari proses perintisan yang telah berjalan maupun sarana yang akan dicapai maka perlu tetap dijaga kontinuitas serta meningkatkan baik volume maupun frekuensi kegiatan sehingga dapat membantu mempercepat proses perwujudannya.

Kembali ke masalah sayembara Panitia Kerja Perencanaan berhasil menyusun konsep TOR Pembangunan WSN serta Peraturan dan Syarat-syarat Sayembara tahap II. Di samping itu Panitia juga berhasil membentuk Dewan Penilai Sayembara. Bersama-sama Dewan Penilai konsep dimatangkan menjadi sebuah Pedoman sebagai acuan penyelenggaraan sayembara. Dewan Penilai terdiri atas 9 orang : Ir. Juswadi M.Arch (IAI); Ir. Darmawan Prawiroharjo (IAI); Ir. Azhar (IAI), sebagai Ketua; Ir. Salmon Kodiyat (IAI); Ir. Joko Suyarto M.Sc.(IAP); Dr. Suryanto; Fajar Sidik; Ir. Bunyamin Ramto dan Ir. Wiratman Wangsadinata (HAKI).

Dalam Syarat-syarat Sayembara antara lain dimuat tentang : gagasan tentang WSN, lingkup perencanaan, syarat gambar rencana, kriteria penilaian serta hak dan kewajiban Dewan Juri dan Peserta. Penilaian diarahkan pada :

1. Pemenuhan syarat-syarat yang telah ditentukan.
2. Fungsi bangunan yang berbobot nasional dengan pandangan jauh ke depan.
3. Aspek arsitektonis dan sistem pendukungnya.
4. Segi keserasian terhadap lingkungan dan tata kota.
5. Segi Fleksibilitas penggunaan dan komunikasi antarruang serta sistem-sistem pelaksanaannya.
6. Segi Kemungkinan pengembangan di kemudian hari.

Di samping Pedoman Sayembara, kepada peserta dibagikan Term of Reference (TOR) Wisma Seni Naskah dari naskah dan data yang relevan. Calon peserta yang dinyatakan disetujui adalah : PT. Gubah Laras, Jakarta; PT. Perencana Jaya, Jakarta ; PRW. Architect, Jakarta; PT. Carita Arsa, Jakarta; PT.Akronim, Jakarta; Biro Perencana Arsiplan, Bandung; Biro Perencana Birano, Bandung; dan Biro Perencana C.A.E. Bandung.

Pada tanggal 17 Desember 1977, hasil sayembara diumumkan. Dasar penilaian diarahkan pada 4 disiplin ilmu, yaitu :

1. Planologi
2. Arsitektur
3. Struktur
4. Seni Budaya

Hasil penilaian terpilih adalah sebagai berikut :

1. Pemenang I, peserta dengan nomor kode : 823382
2. Pemenang II, peserta dengan motto : GONIA
3. Pemenang III, peserta dengan motto : PA.1.77

Dengan telah dihasilkannya pemenang sayembara disain, maka untuk langkah penyusunan Master Plan akan lebih mudah dan jelas konsep dasarnya. Meskipun demikian Panitia Perencanaan masih menyarankan agar dalam tahun anggaran 1979/1980 diselenggarakan seminar dan dilanjutkan dengan lokakarya yang akan membahas masalah-masalah :

- a. Pedoman pokok pengelolaan WSN.
- b. Lingkungan kewenangan konservasi, preservasi dan inovasi bagi WSN.
- c. Penggunaan prinsip-prinsip arsitektonis WSN.

III. HAMBATAN PELAKSANAAN

Berdasarkan hasil yang dicapai seperti di atas, mulai dilakukan persiapan pelaksanaan pembangunan fisik WSN. Panitia Kerja Nasional Perencanaan WSN dibubarkan dan diganti dengan Panitia Kerja Persiapan Pembangunan WSN dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Dr. Daed Joesoef, No. 0160/0/1980, tanggal 7 Mei 1980, yang tugasnya adalah sebagai berikut :

1. mengumpulkan semua bahan dan menginventarisasi semua kegiatan dan inventaris sebagai hasil kerja Panitia Kerja Nasional Perencanaan WSN untuk dijadikan suatu "laporan lengkap" dari Panitia.
2. menyaring semua permasalahan yang timbul dari kegiatan Panitia Kerja untuk dijadikan suatu bahan penelaah guna diajukan sebagai saran staf.
3. mengadakan penilaian semua laporan Panitia Kerja Perencanaan untuk dijadikan bahan pelaksanaan tugas pokok Panitia Pembangunan WSN.
4. menyusun suatu laporan lengkap yang materinya berintikan suatu perencanaan baru WSN sebagai hasil kerja Panitia Kerja Pembangunan untuk dijadikan bahan saran, usul dan pengembangan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan guna menetapkan kebijaksanaan lebih lanjut.

Sebagaimana disebutkan dalam lampiran, Panitia Kerja Pembangunan berjumlah 18 orang, yaitu : Prof. Dr. Haryati Soebadio Sebagai Ketua, Drs. Bastomi Ervan, E. Sudiardjo, SH, Tatang Sastradiraja, Ir. Anjat D. Lamey, Ir. F. Silaban, Drs. Suparmo, Prof. Dr. Astrid S. Soesanto, Dr. Yusuf Enoch, MA, Drs. Moh. Amir Sutaarga, Drs. Uka Tjandrasasmita, Suluh Darmadji, Drs. I Nyoman Tusan, Abas Alibasyah, Ir. Soeparto, Ir. Raswoto, Drs. Fajar Sidik dan Drs. Bambang Soemadio.

Berdasarkan rincian tugas tersebut Panitia Kerja Pembangunan WSN melaksanakan tugasnya dengan menitikberatkan sasaran pada masalah Pemantapan Konsep WSN dan Studi Pengadaan Tanah.

A. Pemantapan Konsepsi WSN

Dalam hal Pemantapan konsepsi hasil yang dicapai antara lain adalah memperjelas tentang pengertian, maksud dan tujuan, isi, fungsi, organisasi dan pengelolaan, serta sarana-sarana WSN.

Mengenai pengertian, maksud dan tujuan rumusannya sama dengan yang telah ditetapkan oleh Panitia Kerja Perencanaan. Sedangkan mengenai isi, diberikan perodasan tentang karya seni rupa dan karya seni pentas yang bagaimana yang akan dimasukkan dalam wadah WSN.

Yang dimaksud dengan karya seni rupa adalah karya seni rupa komporer 45 dengan tahap memperhatikan seni rupa prasejarah, arkeologis baik realia maupun replika yang mengandung nilai etis dari seluruh nusantara. Sedangkan mengenai seni pentas ialah karya-karya teater tradisional dan kontemporer.

Berdasarkan pandangan, gagasan dan pemikiran di Ras pada tahun 1982 dapat diselesaikan penyusunan Master Plan Wisma Seni Nasional di Jakarta. Master Plan dibuat oleh PT Arsiplan, JI. Dipati Ukur No. 88 A Bandung sebagai pemenang I di bawah pimpinan seorang arsitek terkenal Ir. Slamet Wirasonjaya MLA, sebagai Pemenang Sayembara II, berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan No. 28A/WSN/DX/1981, tanggal 3 Oktober 1981.

Yang menjadi perhatian utama dalam pembangunan WSN adalah sebuah konsep untuk dapat menampung tuntutan aktivitas dari masing-masing fungsi dan hubungannya satu dengan lain tercermin dalam kebutuhan besaran ruang aktivitas, jenis ruang penunjang, gubahan ruang dan penunjang yang akan memberi karakter bagi lingkungan keseluruhan.

Bertolak dari isi tadi, dijabarkan mengenai fungsi WSIN adalah sebagai berikut :

1 . Bidang Seni Rupa:

- melaksanakan konservasi
- melaksanakan pameran : tetap dan temporer
- melaksanakan penelitian dan pendokumentasian
- melaksanakan pengadaan koleksi dan reproduksi
- melakukan kegiatan bimbingan dan edukasi
- melakukan eksperimentasi kreasi dan inovasi
- melakukan publikasi dan informasi

2. Bidang Seni Pentas

- menyelenggarakan pementasan
- melakukan eksperimentasi kreasi dan inovasi

- menyelenggarakan kegiatan bimbingan dan edukasi
- melakukan penerbitan naskah
- melakukan dokumentasi
- melakukan penelitian

Sedangkan mengenai organisasi dan pengelolaan WSN diusulkan sebagai berikut :

1. Mengingat WSN merupakan lembaga pelayanan kebutuhan kesenian bagi masyarakat, maka agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik WSN perlu ditangani oleh suatu lembaga/badan yang berstatus nasional terdiri atas unsur Pemerintah dan masyarakat.
2. Sebagai suatu organisasi dengan lingkup nasional perlu didukung perumusan pengelolaan yang matang terencana dan terarah.
3. Untuk melaksanakan fungsi dan kegiatan WSN perlu tersedia tenaga ahli dan trampil, dana dari sarana yang mencukupi serta sistem pengelolaan yang memadai.

B. Studi Pengadaan Tanah

Dalam hal penyediaan tanah mulai dari Panitia Kerja Perencanaan melaksanakan tugas hingga Panitia Kerja Pembangunan, masih terjadi perdebatan yang belum menghasilkan kesepakatan. Dilihat dari segi ideal, WSN memerlukan persyaratan lahan yang sangat berat, antara lain lokasi yang strategis dan luas tanah yang cukup. Sementara dilihat dari segi kondisi kota Jakarta yang telah berkembang sangat pesat tidak ada lagi lahan yang kosong kecuali harus mengorbankan bangunan yang ada, dan itu berarti biaya menjadi mahal.

Mengenai di mana WSN akan dibangun dengan mempertimbangkan segi konsepsi ideal, masalah arsitektonis, tuntutan fasilitas yang dibutuhkan dan kemungkinan perluasan di kemudian hari sehingga Ir. F. Silaban bersikukuh mengusulkan agar WSN di bangun di wilayah "green belt" di pinggiran dengan luas lahan 40 Ha. Pada saat itu mencari tanah di daerah pinggiran (misalnya TMII) pada saat itu masih sangat mudah. Berdasarkan berbagai pertimbangan, antara lain untuk memprioritaskan kemudahan transportasi bagi pengunjung WSN, usul tersebut tidak mendapatkan dukungan dari para anggota.

Sementara itu Pemda DKI sangat mendukung lokasi yang akan dipergunakan untuk membangun WSN adalah di atas tanah JI. Medan Merdeka Timur No. 14 Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat Pemda DKI telah mengeluarkan Izin Prinsip Penggunaan Tanah, sesuai Keputusan

Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Ali Sadikin, No. 579 tahun 1977 tentang Penguasaan Perencanaan Bidang Tanah seluas 13 Ha yang terletak di Jl. Medan Merdeka Timur, Kelurahan Gambir, Wilayah Jakarta Pusat, untuk Lokasi Wisma Seni Nasional. Peta situasi dengan nomor pemeriksaan 182/P/P3K/DTK/V/77 aslinya disimpan di Sekretariat Wilayah DKI Jakarta (Biro III) sebagai lokasi WSN.

Setelah 3 tahun keluar keputusan Gubernur DKI seperti tersebut di atas, pelaksanaan proyek masih tersendat-sendat. Kendala utama adalah terbatasnya alokasi anggaran, sementara biaya untuk pembebasannya cukup besar. Tanah seluas 13 Ha yang penggunaannya telah mendapat izin Gubernur sebagian besar bukan milik Departemen Pendidikan. Tanah dan bangunan statusnya ada yang milik Pemerintah, ABRI, Perusahaan Negara (Pertamina), Swasta, dan perumahan penduduk. Tanah yang dalam status milik Departemen Pendidikan dan Kebudayaan adalah :

1. Aula Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, tetapi saat itu masih dipinjam sementara oleh Kodam V Jaya untuk ditempati oleh Brigif I Jaya Sakti sejak tahun 1966 dalam rangka pengamanan Sidang Umum MPRS.
2. Sekolah Menengah Atas Negeri 7 Jakarta, Sekolah Menengah Pertama Negeri 35, sebuah SD, SMA Negeri IV, Jl. Batu, Kantor Direktorat Kepemudaan Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga, serta flat yang dihuni oleh karyawan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Untuk memindahkan Brigif I Jaya Sakti Departemen Pertahanan dan Keamanan telah membangun Markas Brigif I Jaya Sakti yang baru di daerah Pekayon Jakarta Timur. Sedangkan untuk memindahkan sekolah, telah diadakan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Olah Raga, Pemda DKI Jaya dan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan DKI Jakarta, agar secara bertahap dapat dipindahkan ke tempat lain.

Dengan demikian, masalah pokok yang dihadapi oleh proyek adalah belum dapat dibebaskannya tanah di luar milik Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Sementara itu, meskipun setiap tahun anggaran selalu diusulkan anggaran pembebasan tanah, tetapi tidak mendapatkan persetujuan dari Bappenas dan Departemen Keuangan.

Melihat belum adanya perkembangan proyek ini keluar surat Gubernur DKI yang kedua yang ditandatangani oleh Wakil Gubernur Bidang I/Kesejahteraan Rakyat, Sardjono Soeprapto No. 419/BKD/WKI/80, tanggal 30 Juli 1980,

tentang lokasi WSN dan saran tahap pembangunannya, yang isinya sebagai berikut :

1. bahwa Gubernur DKI pada dasarnya tetap mempertahankan areal seluas 13 Ha. di Jl. Medan Merdeka Timur sebagai lokasi yang diperuntukkan WSN;
2. bahwa untuk segera dapat diwujudkan berdirinya WSN disarankan untuk dilaksanakan secara bertahap menurut kemampuan biaya yang dapat disediakan;
3. bahwa sebagai tahap pertama disarankan untuk memulai pengosongan tanah yang sebagian besar telah dikuasai oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
4. bahwa dengan menguasai sementara areal tanah sekitar 2 Ha, bangunan pokok kompleks WSN telah bisa terwujud.

Di samping itu disarankan pula agar pola pembangunannya bisa dibuat melebar (*in de breedte*) tetapi juga bisa ke dalam (*in de diepte*) dan vertikal (*bertingkat*).

IV. KEBIJAKSANAAN BARU TENTANG WISMA SENI NASIONAL

Pada awal April 1981 pihak Pemda DKI melalui Bappeda DKI dalam suatu rapat Panitia menyarankan agar mengusahakan tanah seluas 8 Ha saja sehingga pembangunan WSN dapat segera dimulai. Sementara dari pihak Arsitek mengusulkan lahan lebih kecil lagi yaitu cukup dengan 6 Ha saja.

Sementara itu gedung Aula Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang dipergunakan oleh Satuan Brigif I Jaya Sakti, sesuai dengan surat Panglima Komando Wilayah Pertahanan I/Daerah Militer V Jaya No. SKEP/194/I/1982, tanggal 30 Januari 1982 yang ditandatangani oleh Mayor Jenderal TNI Norman Sasono, gedung tersebut diserahkan kembali kepada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Lahan hampir seluas 1,5 Ha dan bangunan kuno yang berdiri di atasnya, menjadi modal untuk pendirian WSN.

Kendala utama kenapa proyek ini terkesan tidak bergerak maju disebabkan dukungan anggaran yang disediakan relatif kecil, sehingga belum dapat memulai dengan pekerjaan yang berarti. Tahun 1985 terjadi krisis moneter yang disebabkan harga minyak di pasaran internasional jatuh. Turunnya harga minyak yang semula dijadikan andalan utama dalam penyediaan anggaran pembangunan menyebabkan jumlah APBN menjadi menurun tajam.

Akibat dari krisis moneter tersebut di atas maka, keluarlah kebijaksanaan pemerintah untuk membatasi dan menghemat pengeluaran. Kebijakan mengencangkan ikat pinggang menyebabkan beberapa proyek ditunda terutama proyek-proyek yang memerlukan dana besar dan tidak terlalu mendesak pembangunannya. Proyek WSN termasuk dalam daftar proyek yang harus ditunda, dan pada tahun anggaran 1985/1986 proyek ini sempat "diistirahatkan".

Dengan diistirahatkannya proyek ini bukan berarti semangat untuk mendirikan WSN menjadi kendur. Di samping mengusulkan agar proyek yang diistirahatkan dapat dihidupkan kembali, juga diadakan peninjauan kembali, merevisi rancangan WSN disesuaikan dengan perkembangan keuangan negara.

Pada hakikatnya hasil yang dapat dicapai oleh proyek selama ini ada 2 (dua), yaitu : Pertama, Konsepsi tentang WSN yang terdiri atas 2 fungsi, yaitu fungsi untuk membina dan mengembangkan seni rupa dan seni pentas. Kedua adalah modal tanah sekitar 1,5 Ha, yaitu bekas Aula Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Prot Dr. Fuad Hassan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada saat itu mengeluarkan empat kebijaksanaan baru berkaitan dengan gagasan pendirian WSN, sebagai berikut :

Pertama, gedung aula yang telah diserahkan kepada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan agar dapat dapat difungsikan secara optimal. Gedung tersebut perlu direnovasi dan untuk sementara dimanfaatkan menjadi Gedung Pameran Seni Rupa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (GPSR).

Dalam tahun anggaran 1986/1987 diusulkan lagi kepada pihak Suprasistem (Bappenas dan Departemen Keuangan) agar proyek WSN dapat dihidupkan meski anggarannya kecil. Usul tersebut disetujui dan tahun anggaran 1986/1987 Proyek Wisma Seni Nasional mendapatkan anggaran sebesar Rp. 1.114.500.000,00 untuk membiayai gedung aula menjadi GPSR Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Pelaksanaan pemugaran selesai tahun 1987, diresmikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Prof. Dr. Fuad Hassan, pada tanggal 23 Februari 1987.

Kedua, mengingat untuk mewujudkan lahan seluas 13 Ha sangat sulit karena memerlukan dana yang besar, WSN yang terdiri atas dua komponen yaitu galeri dan teater dipecah menjadi dua dan dibangun di tempat yang berbeda.

Ketiga, untuk fungsi pembinaan dan pengembangan seni rupa dicarikan lahan lain, yaitu di Taman Mini Indonesia Indah dengan sebutan Art Galeri Nasional. Pemilihan ini sesuai dengan petunjuk Ibu Tien Soehanto dan lokasi yang ditunjuk adalah yang sekarang menjadi tempat berdirinya Museum Al Qur'an.

Kegiatan yang telah dilakukan baru sampai pada tahap penyusunan Master Program dan Konsep Perencanaan Master Plan Art Galery Nasional yang disusun oleh Konsultan Perencana PT. Tripranoto Sri. Sedangkan untuk pembebasan tanah seluas 3,5 ha karena dukungan dananya terbatas, sehingga tidak cukup untuk membebaskan lahan seluas tersebut.

Keempat, bangunan untuk fungsi pembinaan dan pengembangan seni pentas dibangun di tanah Bekas Bandar Udara Kemayoran, dengan sebutan Gedung Seni Pertunjukan. Pemilihan lokasi di Bekas Bandara Kemayoran sesuai dengan surat Menteri Sekretaris Negara No. R-707/M.Sesneg/11/1988 tanggal 29 November 1988, tentang peruntukan sebagian tanah Kompleks Kemayoran untuk Lokasi pembangunan Pusat Kebudayaan (Culture Centre). Tanah ini dihibahkan kepada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (tanpa nilai penggantian).

Persiapan pembangunan Gedung Seni Pertunjukan baru pada tahap penyusunan Master Program dan Konsep Perencanaan Master Plan Gedung Seni Pertunjukan Kemayoran yang dibuat oleh Ir. Slamet Wirasonjaya, seorang arsitek dari Bandung yang juga merencanakan disain Wisma Seni Nasional.

V. GAGASAN PENDIRIAN PUSAT PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN

Dalam perkembangan selanjutnya, keadaan keuangan tetap belum mampu mendukung kelancaran pembangunan Galeri Nasional maupun Gedung Seni Pertunjukan. Kedua proyek di atas masih tetap dalam wujud gagasan semata, sementara anggaran proyek WSN hanya mampu menyediakan anggaran operasional GPSR.

Tahun 1992, gedung SMA Negeri 7 dipindahkan ke Tanah Abang dan selanjutnya gedung tersebut diserahkan kepada Direktorat Jenderal Kebudayaan, sesuai dengan surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan DKI Jakarta No. 1222/I01.B2/U/92 tanggal 28 Oktober 1992. Dengan diserahkannya gedung ini, lahan GPSR menjadi bertambah luas, sedangkan bangunan sekolah diputuskan untuk direnovasi dan dijadikan perluasan gedung Induk yang telah ada.

Setelah mengalami pengembangan, sosok GPSR menjadi semakin disegani. Dengan luas bangunan yang cukup, sistem penerangan yang memadai, arsitektur bangunan yang unik dan antik, serta lokasi yang strategis di pusat kota Jakarta, sehingga gedung ini dipilih untuk menjadi tempat penyelenggaraan pameran tingkat internasional yaitu Pameran Seni Rupa Kontemporer Negara-negara Gerakan Non-Blok. Pameran dibuka oleh Bapak Presiden Soeharto pada tanggal 28 April 1995 berlangsung hingga 30 Juni 1995. Pameran diikuti oleh 41 negara anggota Non-Blok, menampilkan 350 karya lukis, patung dan grafis, nama GPSR Gambir terbawa menyebar ke seluruh benua.

Bagi kalangan seniman seni rupa, baik di dalam maupun di luar negeri GPSR telah dikenal. Acara pameran yang diselenggarakan oleh seniman, baik dalam dan luar negeri terus meningkat setiap tahun. Di mata seniman, GPSR telah dijadikan semacam "alat ukur" keseniman. Bagi seniman yang dapat berperan di GPSR seolah telah mendapat pengakuan dari masyarakat pada tingkatan mana dia berada.

Kembali ke masalah WSN, dalam perjalanan selanjutnya kebijaksanaan memisahkan menjadi dua bagian yaitu Galeri Nasional dan Gedung Seni Pertunjukan ternyata juga tidak bisa berhasil. Biaya pembebasan tanah untuk Galeri Nasional di Taman Mini Indonesia Indah tidak dapat disediakan oleh proyek. Sementara itu dana untuk pembangunan gedung Teater Nasional yang tanahnya telah disediakan oleh Badan Pengelola Kemayoran tidak tersedia.

Sesuai kebijaksanaan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Prof. Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro, pada tahun 1995 konsep pembangunan WSN dikembalikan pada ide semula yaitu WSN berada dalam satu paket dan di satu tempat yaitu tetap di lokasi Jl. Medan Merdeka Timur Jakarta. Di samping itu konsep dasarnya diadakan penyempurnaan, dan namanya diubah menjadi PUSAT PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN NASIONAL (PPKN).

Seperti kita maklumi sejak sebelum Indonesia merdeka kesadaran nasional Indonesia ditandai oleh aspek budaya sebagai bagian dari keseluruhan pembangunan bangsa. Sumpah Pemuda tahun 1928 yang menyatakan kita menggunakan satu bahasa, bahasa Indonesia adalah perwujudan kesadaran nasional yang ditandai oleh aspek budaya karena bahasa adalah alat manusia untuk mengungkapkan gagasan dari juga sebagai alat pemersatu bangsa. Sesudah merdeka, pimpinan pemerintah lebih memperhatikan peran kebudayaan dalam pembangunan bangsa. Pertemuan budaya antar suku bangsa terus dikembangkan agar terjadi saling mengenal, saling memahami yang pada gilirannya akan memperkukuh keberadaan budaya nasional dan persatuan bangsa.

PPKN bukan dimaksudkan akan menjadi pusat yang akan mengatur dan mengendalikan perkembangan kebudayaan yang tumbuh di kalangan masing-masing suku bangsa sehingga menjadi seragam. PPKN dimaksudkan untuk menjadi wadah yang berfungsi sebagai pusat pertemuan dan perkenalan kebudayaan yang berkembang di seluruh tanah air agar dapat bersanding satu sama lain.

PPKN dirancang untuk dapat memberikan pelayanan dalam spektrum yang luas terhadap kepentingan masyarakat. Pertama, masyarakat umum mendapatkan kepuasan batin karena dapat mengkonsumsi karya yang baik di bidang seni dan budaya untuk kebutuhan hidup spiritualnya. Kedua, adalah kelompok profesional, baik sebagai seniman, kritikus seni, mahasiswa seni dapat mengembangan kreativitas seninya dan memperoleh inspirasi dari berbagai data yang disediakan. Ketiga, siswa-siswa sekolah dapat mengikuti kegiatan melalui program-program yang terencana, program ekstra kurikuler harus dilihat sebagai alat untuk membentuk manusia berbudaya.

PPKN adalah sebuah lembaga tingkat nasional untuk membimbing, mengaju dari mengintormasikan hal-hal yang berkaitan dengan pelestarian budaya dan seni kepada masyarakat dari berbagai tingkat sosial dan masyarakat asing sebagai pusat pengembangan kebudayaan tujuan pendiriannya harus dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat umum dalam bentuk :

1. Pameran seni
2. Pertunjukan dalam berbagai gaya dan kategori
3. Pelayanan informasi bidang kebudayaan Indonesia dalam bentuk :
 - a. publikasi cetakan/buku
 - b. material audio visual
 - c. rekaman multi media
4. Fasilitas sidang atau program kuliah

Dengan disatukannya kembali dua komponen fungsi tersebut, maka perlu diambil langkah-langkah baru yang lebih kongkrit. Pembebasan tanah terus dilanjutkan lagi, dan berhasil diserahkan kepada Direktorat Jenderal Kebudayaan adalah :

1. Tanah dan bangunan SMP Negeri 35 diserahkan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan DKI Jakarta, dengan surat No. 964a/IOI.El/LK/97, tanggal 16 Oktober 1997, luas tanah 1951 m² dan bangunan 1.072 m².
2. Tanah dan bangunan kantor Direktorat Pembinaan Generasi Muda, Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Olah Raga diserahkan

kepada Direktorat Jenderal Kebudayaan dengan Berita Acara No. 72/El/LK/ 1 997, tanggal 27 Oktober 1997, luas tanah 1. 180 m² dan bangunan 702 m².

Sementara itu permohonan kepada Pertamina tentang penggunaan tanah gedung Pertamina telah mendapatkan jawaban dan telah diperhitungkan nilai jual aset tersebut guna mendapatkan penggantian dari pihak Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Direncanakan biaya pembangunan gedung tersebut berasal dari dana bantuan (grant) dari Pemerintah Jepang. Untuk merealisasikan pemberian dana bantuan itu telah diproses melalui Bappenas. Sementara itu melalui anggaran proyek terus diupayakan dana untuk pembebasan Flat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang masih ditempati oleh para penghuninya.

VI. PENUTUP

Demikian sekilas tentang sejarah perkembangan (Gedung Pameran Seni Rupa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan selama sebelas tahun. Banyak kegiatan seni rupa yang diselenggarakan di gedung ini dan itu berarti kehadirannya memang diperlukan. GPSR telah telah ikut memberikan sumbangan bagi perkembangan kesenian dari kebudayaan Indonesia. GPSR juga telah ikut berperan dalam mendukung kota Jakarta sebagai kota budaya.

Atas dasar itu maka keberadaan GPSR perlu ditingkatkan menjadi sebuah Galeri Nasional, sehingga fungsi pameran tetap akan dapat dilaksanakan. Melalui pameran tetap akan dapat digambarkan sejarah perkembangan seni rupa Indonesia secara lengkap sehingga dapat difahami oleh masyarakat, khususnya bagi generasi muda.

Sementara itu gagasan untuk mendirikan Wisma Seni Nasional yang disempurnakan konsepnya menjadi Pusat Pengembangan Kebudayaan Nasional akan terus dilanjutkan. berdasarkan pengalaman mempersiapkan pembangunannya selama 24 tahun namun belum menunjukkan hasil maka untuk masa yang datang perlu diambil langkah-langkah strategis, misalnya mengupayakan agar proyek ini menjadi proyek nasional dan pelaksanaannya didasarkan atas Keputusan Presiden.

Jakarta, Januari 1998

Tim Penyusun

Perpustakaan
Jenderal